

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas, sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan setiap daratan atau pulau yang ada hampir seluruhnya dikelilingi oleh lautan. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa lautan memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Potensi pesisir/kelautan tidak kalah penting berkontribusi dalam pembangunan nasional. Menurut Dahuri (dalam Tosepu, dkk, 2016:2). Wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan antara daratan dengan lautan. Wilayah pesisir merupakan kawasan yang memiliki potensi sumber daya potensial. Kawasan pesisir adalah daerah peralihan/transisi antara ekosistem daratan dan lautan. Kawasan ini ke arah darat mencakup daerah yang masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan, seperti pasang surut, interusi air laut, gelombang, dan angin laut, dan ke arah laut meliputi daerah perairan laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses daratan dan dampak kegiatan manusia, seperti aliran air sungai, sedimentasi, dan pencemaran (Cahyadinata, 2009). Kawasan pesisir dikenal sebagai ekosistem perairan yang memiliki potensi sumber daya yang sangat besar. Wilayah tersebut telah banyak dimanfaatkan dan memberikan sumbangan yang berarti bagi peningkatan taraf hidup masyarakat di kawasan pesisir dan juga sebagai penghasil pendapatan daerah yang sangat penting. Salah satu potensi kawasan pesisir, yakni sebagai pengembangan kawasan pariwisata (Fauzi, 2009).

Wilayah pesisir memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang sangat tinggi baik itu sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam hayati. Potensi sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan oleh penduduk sekitar, terutama masyarakat yang dapat di katagorikan ekonomi rendah. Dengan demikian, secara sempit masyarakat pesisir memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan potensi dan kondisi sumber daya pesisir dan lautan. Masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumber daya pesisir. Nelayan merupakan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir yang beraktivitas sebagai penangkap ikan. Masyarakat nelayan memiliki karakteristik khusus yang membedakan mereka dari masyarakat lainnya, yaitu karakteristik yang terbentuk dari kehidupan di lautan yang sangat keras dan penuh dengan resiko, terutama resiko yang berasal dari faktor alam.

Hasil perikanan laut merupakan sumberdaya yang besar. Ketergantungan masyarakat nelayan terhadap sektor kelautan menjadi sangat krusial akan keberlangsungan hidup sehari-hari. Keadaan seperti ini menjadi permasalahan sosial dan ekonomi sebagai salah satu penyebab utama yang sangat pelik, yaitu pemenuhan kebutuhan pokok yang semakin meningkat, mahal dan langka. Sehingga tidak mudah untuk diatasi. Keadaan seperti ini menjadi permasalahan utama masyarakat nelayan pada saat ini. Terdapat banyak juga kendala yang dialami oleh para nelayan seperti rusaknya mesin, perubahan cuaca, lalu lalang kapal – kapal besar yang mengakibatkan para nelayan kehilangan jaringnya karena terseret oleh kapal tengki yang tentunya merugikan para nelayan. Dari berbagai kendala yang dihadapi tentu hasil tangkapan yang didapat

hanya sedikit. Kondisi seperti ini yang mengakibatkan nelayan menjadi miskin. Hal ini seringkali mengakibatkan terjebak dalam satu cara pandang yang melihat masalah kemiskinan sebagai sebuah “kondisi” Artinya, pandangan mengenai “kemiskinan” sebagai problem sosial disamakan dengan keadaan tertentu, pada satu saat. Cara pandang itu memang memudahkan untuk dapat mengukur kemiskinan dari indikator-indikator yang bersifat generik, seperti kondisi tempat tinggal, jenis dan jumlah asupan gizi, tingkat pendapatan dan kepemilikan aset, dan sebagainya.

Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang sering terjadi di masyarakat dan pada umumnya ditandai dengan derita keterbelakangan, ketertinggalan, rendahnya produktivitas, selanjutnya meningkat menjadi rendahnya pendapatan yang diterima. Hampir di setiap negara, kemiskinan selalu terpusat di tempat-tempat tertentu, yaitu biasanya di pedesaan atau daerah-daerah yang kekurangan sumber daya alam. Terkait itu penduduk pesisir umumnya masih memiliki keterampilan yang rendah sehingga tidak mampu bersaing dengan masyarakat lainnya atau tidak dapat beralih profesi lain selain menjadi nelayan. Sejalan dengan era otonomi daerah yang luas, dan diiringi dengan menguatnya tuntutan demokratisasi, peningkatan peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta perhatian pada potensi keanekaragaman daerah, maka pembangunan kelautan dan perikanan harus memperhatikan daerah, dan percepatan pembangunan ekonomi daerah yang ditopang dengan upaya-upaya pengembangan masyarakat.

Kesulitan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan salah satunya dipengaruhi oleh keterbatasan kemampuan modal usaha karena teknologi penangkapan sudah canggih namun pengeluaran meningkat. Dalam hal ini kesejahteraan dapat diartikan dengan sebuah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan

akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin.

Kesejahteraan nelayan merupakan suatu masalah yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan. Provinsi Bali yang terkenal dengan keindahan alamnya, dan memiliki banyak pantai seharusnya memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan masyarakat pesisir. Menitik beratkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di sector nelayan yang hidup di daerah pesisir, dengan ketidakpastian penghasilan yang menghambat mereka untuk dapat segera lepas dari kemiskinan. Dibutuhkan suatu model yang komprehensif sehingga dapat memecahkan masalah kemiskinan nelayan, karena kemiskinan nelayan tidak akan mampu ditangani secara kelembagaan oleh sektor kelautan dan perikanan, melainkan seluruh pihak terkait.

Kabupaten Karangasem merupakan salah satu wilayah daerah di provinsi Bali yang memiliki panjang pesisir mencapai 87 Km (Web Kabupaten Karangasem, 2020). Dengan potensi pesisir yang memiliki sumber daya kelautan yang melimpah tentunya akan menjadi pondasi utama penghasilan khususnya bagi masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Terdapat empat kecamatan di kabupaten karangasem yang memiliki potensi nelayan, yaitu kecamatan manggis, kecamatan karangasem, kecamatan abang dan kecamatan kubu. Berdasarkan data Dinas Perikanan Kabupaten Karangasem, Populasi jumlah nelayan di kabupaten karangasem sebesar 5.222 orang, yang terbagi atas kecamatan manggis sebanyak 646 orang, kecamatan karangasem sebanyak 1.374 orang, kecamatan abang sebanyak 1.851 orang, dan kecamatan Kubu sebanyak 1.351 orang.

Berdasarkan pada data tersebut, Kecamatan Abang merupakan salah satu kecamatan yang memiliki penduduk nelayan terbesar dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang terdapat di kabupaten karangasem.

Sub sektor perikanan di Kabupaten Karangasem terbagi menjadi dua yaitu sub sektor perikanan laut dan sub sektor perikanan darat/air tawar. Terkhusus pada sektor perikanan laut, berdasarkan Data Dinas Perikanan Kabupaten Karangasem (2019), jumlah produksi perikanan di Kabupaten Karangasem terjadi peningkatan pada setiap tahunnya. Tahun 2017 produksi sebesar 24.656,90 ton, tahun 2018 produksi sebesar 26.390,1ton dan ditahun 2019 produksi sebesar 26.795,20 ton.

Peningkatan produksi perikanan tersebut nyatanya belum mampu memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Purwakerti yang merupakan salah satu Desa yang memiliki potensi kecil sebagai nelayan dan memiliki penduduk nelayan sedikit di Kecamatan Abang yang berjumlah 93 orang. Hal tersebut dapat dilihat dari masih tingginya angka kemiskinan yang terdapat di Desa Purwakerti. Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kabupaten karangasem, jumlah angka kemiskinan tertinggi di Kecamatan Abang ditunjukkan pada Desa Purwakerti

Desa Purwakerti merupakan salah satu desa yang sebagian bermata pencaharian nelayan sementara itu dalam hal pendidikan saat ini penduduk desa Purwakerti. Hanya bisa menempuh pendidikan sampai SMA dan sebagian sedikit dari mereka yang menempuh pendidikan jenjang perguruan tinggi. Akan tetapi pendidikan untuk kepala keluarga (ayah) masih banyak yang lulusan sekolah dasar (SD), hal tersebut dikarenakan biaya yang terbatas untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi. Karna orang tua

mereka hanya lulusan. SD mereka bisa mencari uang dengan menggunakan ketrampilan mereka yaitu melaut.

Banyak kepala keluarga nelayan di Desa Purwakerti yang mencari pekerjaan sampingan, ini dilakukan karena penghasilan yang di peroleh sebagai nelayan tidak mencukupi kehidupan hidup keluarga. Usaha ini harus dilakukan untuk menambah penghasilan oleh kepala keluarga nelayan agar dapat menambahkan penghasilan sampingan oleh kepala keluarga nelayan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Untuk dapat memenuhi pendapatan rumah tangga nelayan yang masih dapat dikatakan rendah, anggota keluarga nelayan di Desa Purwakerti memiliki profesisebagai nelayan dan juga mengambil kerja sampingan di bidang pariwisata seperti menjadi pegawai di restoran maupun menjad pemandu wisatawan. Tambahan penghasilan bersumber dari istri dan anak, hal ini dilakukan juga agar pendapatan keluarga dapat ditingkatkan, namun penambahan penghasilan dari keluarga ini masih dirasa kuarang untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga nelayan itu sendiri.

Berbagai cara telah dilakukan oleh para nelayan untuk meningkatkan kesejaterahannya namun cara tersebut terkadang justru menjebak mereka dalam ketergantungan dengan pihak lain sekaligus menempatkan diri mereka pada posisi yang lemah. Kondisi seperti ini mengakibatkan sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah sampai sekarang ini belum mampu dikelola serta di dimanfaatkan secara optimal sehingga belum memberikan kontibusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejaterhan nelayan. Ketidak mampuan masyarakat nelayan disebabkan beberapa faktor. seperti minimnya modal usaha, keterbatasan ketrampilan, kurangnya teknologi pendukung dan terbarukan, keadaan alam yang berbeda-beda dan kurangnya perhatian

dari pemerintah. Karena itu kemiskinan merupakan label yang senantiasa melekat kepada eksistensi masyarakat nelayan diberbagai daerah (Kusnadi: 2015). Kesulitan masyarakat nelayan semakin bertambah dikarenakan tekanan-tekanan sosial, ekonomi dan kurang keberpihakannya kebijakan pemerintah saat ini.

Secara umum arah kebijakan pengelolaan pembangunan perikanan dan kelautan yang diperlukan harus diarahkan kepada kesejahteraan rakyat, menciptakan lapangan kerja dan juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan merupakan suatu pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja bersifat umum atau khusus. Kebijakan strategis seperti pemberdayaan masyarakat nelayan (empowerment), merupakan kebijakan yang sangat penting karena terkait dengan upaya mensejahterakan masyarakat. Sampai saat ini masyarakat nelayan masih mengharapkan kebijakan dan jaminan dari pemerintah terhadap beberapa permasalahan terkait dengan pemenuhan kebutuhan pokok untuk operasional melaut, seperti jaminan keselamatan (asuransi jiwa dan kerusakan kapal) akibat dari kecelakaan dan bencana alam, jaminan ketersediaan bahan bakar dan jaminan kesetabilan harga sembako. Namaun masih sering nelayan tidak melaut dikarenakan kebijakan pemerintah terkait pembatasan penggunaan bahan bakar seperti solar. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, nelayan kecil didefinisikan sebagai mereka yang menangkap ikan di laut dan menggunakan perahu di bawah 5 GT. Di lapangan, justrunelayan berkapasitas maksimal 5 GT inilah yang kesulitan mengakses BBM bersubsidi.

Pada hakikatnya masyarakat nelayan selalu memegang teguh adat istiadat dan norma-norma yang sudah ada sejak dahulu, seperti: prinsip saling tolong-menolong,

saling menghargai, keterbukaan, ramah-tamah, merasa seperjuangan dan sifat gotong-royong. Kearifan masyarakat pesisir di Desa Purwakerti tampak dari adanya awig-awig (aturan adat), meski awig-awig tersebut bukan awig-awig tertulis, namun awig-awig yang bersifat lisan dan bertumpu pada pola kesadaran masyarakat. Awig-awig ini menyangkut tentang larangan penggunaan racun maupun bom dalam pencarian ikan di laut dan upaya menjaga kebersihan pantai dan laut. Sesama nelayan saling mengawasi satu sama lain. Apabila ada yang melanggar seperti menggunakan potassium, maka akan dikeluarkan dari kelompok nelayan. Kesadaran dan semangat yang dimiliki masyarakat nelayan ini adalah modal yang sangat baik bagi keberlanjutan pengelolaan sumberdaya pesisir laut di desa purwakerti. Di perlukan dukungan dari pihak desa serta dinas kelautan dan perikanan untuk bersama-sama membangun perikanan di Desa Purwakerti, namun hal ini justru menjadi kendala bagi masyarakat nelayan, karena pihak desa belum ikut terjun langsung dalam mengelola sumberdaya yang ada. Selain kendala di atas, terdapat masalah yang timbul dalam pengelolaan sumberdaya pesisir laut di Desa Purwakerti, yaitu tidak adanya pendataan produksi hasil tangkapan ikan yang di dapat dari nelayan. Hasil tangkap akan langsung dibeli oleh tengkulak yang datang. Sehingga kita tidak dapat mengetahui secara jelas dan pasti tingkat eksploitasi perairan di Desa Purwakerti.

Pada masa sekarang penangkapan ikan yang dapat di gunakan sudah canggih namun untuk para nelayan di Desa Purwakerti ini sendiri masih menggunakan alat – alat yang masih sederhana yakni seperti jaring dan alat pancing. Tetapi untuk transportasi nelayan yang digunakan di Desa Purwakerti sudah cukup canggih, dapat dilihat dari pemakaian jukung para nelayan yang sudah menggunakan mesin tempel, bahkan beberapa nelayan sudah menggunakan 2 mesin tempel sekaligus. Hal ini tentu menjadi

penyebab kerugian dari pihak nelayan itu sendiri terlebih lagi tangkapan ikan yang di dapat sedikit. Alat tangkap yang di gunakan berupa jaring dan pancing tentu efektif dan ekonomis untuk menangkap berbagai jenis komoditi ikan di laut, terutama untuk di Desa Purwakerti ini lebih banyak mendapatkan jenis ikan tongkol.

Organisasi Pangan PBB (FAO) telah menetapkan sembilan kriteria alat tangkap antara lain, memiliki selektivitas yang tinggi, tidak merusak habitat, tempat tinggal dan berkembang biak ikan dan organisme lainnya, serta tidak membahayakan nelayan atau pihak penangkap ikan tersebut. Kemudian, Kriteria lainnya adalah produk tidak membahayakan kesehatan konsumen, hasil tangkapan yang terbuang minimum, alat tangkap yang digunakan harus memberikan dampak minimum terhadap keanekaan sumber daya hayati, tidak menangkap jenis yang dilindungi undang-undang atau terancam punah.

Berbagai cara telah dilakukan masyarakat nelayan agar tidak merusak habitat ikan tersebut maka dari dinas perikanan dan kelautan membentuk organisasi atau kelompok. Kelompok nelayan di Desa Purwakerti ini sudah dibagi menjadi 4 bagian adapun nama keelompoknya adalah Minaprami, yakni yang terdiri dari Minaprami 1 atau induk dari kelompok minaprami yang sekarang sudah di bagi menjadi 4 bagian yang terdiri dari Minaprami 2 yang beranggotakan 26 orang, Minaprami 3 yang beranggotakan 20 orang, Minaprami 4 yang beranggotakan 29, dan Minaprami 5 yang beranggotakan 18 orang. Pengelompokan ini dilakukan hanya untuk mempermudah pendataan di Dinas Kelautan dan Perikanan.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup nelayan tidak harus bertumpu pada peningkatan produksi hasil tangkapan semata, tetapi mencakup seluruh aspek. Salah satu cara peningkatan produksi adalah dengan mengusahakan unit penangkapan yang lebih produktif dalam jumlah dan hasil tangkapan. Unit penangkapan haruslah bersifat ekonomis, efisien dan sesuai dengan kondisi setempat dengan tidak merusak kelestarian sumberdaya perikanan. Pendapatan masyarakat nelayan akan menentukan tingkat kesejahteraan hidup mereka. Melihat kondisi nelayan dalam kehidupan tersebut peneliti merasa tertarik untuk meneliti bagaimana kebijakan serta teknologi dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan di Desa Purwakerti Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem. Berdasarkan hal tersebut, akan dilakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kebijakan dan Teknologi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Purwakerti Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem”.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masalah rendahnya pendidikan nelayan di desa purwakerti, dimana masyarakatnya lebih memilih nelayan ketimbang pendidikan
2. Tingginya kemiskinan di Desa Purwakerti mencapai 50% padahal memiliki sector pariwisata yang sangat besar
3. Keterbatasan teknologi bagi nelayan di Desa Purwakerti untuk meningkatkan pendapatannya.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh kebijakan terhadap tingkat kesejahteraan nelayan di Desa Purwakerti Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem
2. Apakah ada pengaruh teknologi terhadap tingkat kesejahteraan nelayan di Desa Purwakerti Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem
3. Apakah ada pengaruh kebijakan dan teknologi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan di Desa Purwakerti Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh kebijakan terhadap tingkat kesejahteraan nelayan di Desa Purwakerti Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem
2. Pengaruh teknologi terhadap tingkat kesejahteraan nelayan di Desa Purwakerti Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem
3. Pengaruh kebijakan dan teknologi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan di Desa Purwakerti Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk semua pihak yang secara langsung terkait didalamnya maupun yang membacanya. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dan memberikan pengetahuan konseptual untuk penelitian yang serupa ataupun penelitian yang selanjutnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam perkembangan serta kemajuan pada dunia pendidikan. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi untuk literatur pertimbangan dalam penyusunan penelitian selanjutnya

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kesempatan untuk penulis menerapkan pengetahuan penulis tentang ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan.

b) Bagi Instansi Yang Bersangkutan

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi terkait Pengaruh Kebijakan dan Teknologi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk masyarakat agar tujuan dapat berjalan sesuai dengan harapan.

c) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ke universitas dan dapat menambah referensi yang digunakan dalam penelitian yang nantinya akan melakukan penelitian yang serupa atau yang berhubungan dengan penelitian.